

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP AMBANG BATAS DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DI SUMATERA UTARA TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AHLIL AZHARI HASIBUAN**

**23143046**



**JURUSAN SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**1438 H / 2018 M**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP AMBANG BATAS DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DI SUMATERA UTARA TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi

Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Strata Satu (S1) Ilmu Syari'ah dan Hukum

**OLEH :**

**AHLIL AZHARI HASIBUAN**

**23143046**



**JURUSAN SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**1438 H / 2018 M**

### **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Ahlil Azhari Hasibuan  
NIM : 23. 14. 3046  
JURUSAN/FAKULTAS : Siyasah ( Hukum Tata Negara )/ Syari'ah Dan Hukum  
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Ambang Batas Dalam Pemilihan Gubernur Di Sumatera Utara Tahun 2018

Saya yang menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar hasil karya saya sendiri bukan hasil menjiplak/ plagiat dari karya tulis orang lain. Baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini di kutip atau di rujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Medan, 12 September 2018

  
Ahlil Azhari Hasibuan  
NIM. 23. 14. 3046

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP AMBANG BATAS DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DI SUMATERA UTARA TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

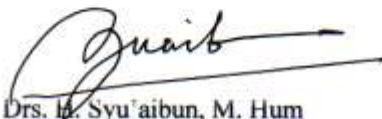
Oleh :

**AHLIL AZHARI HASIBUAN**

**NIM. 23143046**

Mengetahui :

**PEMBIMBING I**



**Drs. Iq. Syu'aibun, M. Hum**

**NIP. 195910 211988031 001**

**PEMBIMBING II**



**Adlin Budhiawan SH, M. Hum**

**NIP. 19820510 200901 1 014**

Mengetahui :

Ketua Jurusan Siyasah

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara



**Fatimah, SAg. MA**

**NIP. 19710320 199703 2 003**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: ( **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP AMBANG BATAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DI SUMATERA UTARA TAHUN 2018**). Telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, tanggal 31 Oktober 2018. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Siyasa.

Medan, 31 Oktober 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua

  
**Fatimah, S.Ag. MA**

NIP. 19710320 199703 2 003

Sekretaris

  
**Dr. Dhiauddin Tanjung, MA**

NIP.19791020 200901 1 010

Anggota

  
**Drs. H. Syu'aibun. M. Hum**

NIP. 19591021 1988031 001

  
**Adlin Budhiawan SH, M.Hum**

NIP. 19820510 200901 1 014

  
**Dr. Ramadhan Syahmedi, MAg**

NIP. 19750918 2007 101002

  
**Putri Eka Ramadhani, BB.M. Hum**

NIP. 198207202009 01 2007

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU**

**Dr. Zulham, M. Hum**

NIP. 19770321 200912 1 009

## **IKHTISAR**

Skripsi ini berjudul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemilihan Gubernur Di Sumatera Utara Tahun 2018. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Adapun jabatan-jabatan tersebut diantaranya adalah presiden, wakil rakyat, dan juga kepala daerah. Pemilihan umum dalam hal ini adalah pemilihan kepala daerah setiap bakal calon harus mempunyai partai politik untuk mengusung calon tersebut atau bisa maju sebagai calon independent. Partai politik mempunyai peran strategis dalam negara demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur kedudukan partai politik dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Partai politik adalah satu-satunya organisasi yang dapat menjadi peserta pemilu dan mengajukan calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Salah satu kewenangan partai politik adalah mengajukan calon Gubernur di setiap Provinsi. Bertolak dari hal tersebut, penelitian ini membahas mengenai dua pokok permasalahan yakni berkaitan dengan kewenangan partai politik terhadap mengusung bakal calon dalam pemilihan Gubernur khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 yang bertentangan dengan konsep fiqih siyasah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan secara normatif yang mengatur terkait ketentuan pencalonan bakal calon pada pemilihan Gubernur khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan terkait mengenai ketentuan dalam kajian fiqih siyasah yang berhubungan dengan peraturan pencalonan bakal calon dalam pemilihan Gubernur. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam hal ini fiqih siyasah. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa partai politik mempunyai peran sangat penting dalam demokrasi dan penyelenggaraan negara. Partai politik diberikan kewenangan untuk mengajukan calon-calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik baik di tingkat eksekutif maupun legislatif termasuk jabatan kepala daerah. Dan menurut pandangan fiqih siyasah setiap manusia berhak untuk menjadi seorang pemimpin dan hal tersebut tertuang dalam kajian siyasah syar'iyah dan siyasah dusturiyah.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta kekuatan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar, Muhammad saw beserta ahli bait dan sahabat-sahabatnya.

Keberhasilan Skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dosen pembimbing dan para dosen serta bantuan dari berbagai pihak yang ada di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Zulham, S.H.I M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Ibu Fatimah, MA dan Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung, SHI, MA. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak Drs. H. Syu'aibun M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dan mengarahkan dengan kelembutan dan keikhlasan hati serta rela meluangkan waktu dalam mengarahkan dan membimbing pengerjaan skripsi ini.

5. Adlin Budhiawan SH M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dengan kelembutan dan keikhlasan hati serta rela meluangkan waktu dalam mengarahkan dan membimbing pengerjaan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan berguna dikemudian hari.

7. Keluarga, Sanak famili yang tidak henti-hentinya memberikan masukan, nasehat, dan motifasi dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Dan teman-temanku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.



Akhirnya tanpa mengingkari adanya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap saran dan kritik yang membangun,. Semoga tulisan ini bermanfaat dan merupakan sumbangan bagi kajian ilmu-ilmu keislaman, khususnya di bidang ilmu syariah. Amin.

Medan, 12 September 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Metodologi Penelitian.....	15
F. Kerangka Teoritis .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II: PENCALONAN GUBERNUR MENURUT PERATURAN</b>	
<b>PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>21</b>
A. Mekanisme Pencalonan Gubernur Menurut Peraturan	
Perundang-Undangan .....	21
1. Peraturan Perundang-Undangan .....	21

2. Mekanisme Pencalonan Gubernur .....	24
B. Dasar Hukum Hak Partai Politik Mencalonkan Bakal Calon	
Dalam Pemilihan Gubernur .....	27
1. Aspek HAM Sebagai Konsep Dalam Pilkada .....	27
2. Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 .....	29
C. Peran Partai Politik Dalam Proses Pencalonan Pemilihan	
Gubernur .....	31
1. Partai Politik .....	31
2. Peran Partai Politik .....	31

### **BAB III: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ..... 34**

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum .....	34
1. Pemilihan Umum .....	34
2. Sejarah, Tugas dan Wewenang KPU Provinsi	
Sumatera Utara .....	35
B. Biografi KPU Provinsi Sumatera Utara .....	37
C. Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Utara .....	39

## **BAB IV: ANALISIS PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA**

### **UTARA TAHUN 2018 MENURUT FIQIH SIYASAH ..... 41**

#### A. Analisis Pemilihan Gubernur Di Sumatera Utara Menurut Fiqih

Siyasah ..... 41

#### B. Analisis Fiqih Siyasah Dalam Pemilihan Seorang Pemimpin 43

1. Pengertian Fiqih Siyasah ..... 43

2. Pandangan Siyasah Syar'iyah ..... 44

3. Pandangan Siyasah Dusturiyah..... 48

#### C. Analisis Pemilihan Seorang Pemimpin Dan Dalil-Dalil

Mengenai

Mencalonan Menjadi Pemimpin Dalam Konteks

Ketatanegaraan Islam ..... 52

1. Pemilihan Seorang Pemimpin Pada Masa

*Khulafaaurasyidin*..... 52

2. Dalil-Dalil Mencalonan Menjadi Seorang Pemimpin ..... 58

3. Pemilihan Pemimpin Di Tinjau Dari Negara Islam ..... 60

## **BAB V: PENUTUP ..... 62**

A. Kesimpulan .....	62
---------------------	----

B. Saran .....	64
----------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
-----------------------	-----------

A. Daftar Pertanyaan/Wawancara KPU Provinsi Sumatera Utara .....	68
---	----

B. Dokumentasi Saat Penelitian Ke KPU Provinsi Sumatera Utara .....	69
--	----

C. Surat Di Perbolehkannya Meneliti Di KPU Provinsi Sumatera Utara	
---	--

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan kepala daerah di Indonesia yang di mulai sejak orde lama memiliki dua cara yakni pemilihan melalui DPRD atau pemilihan secara tidak langsung dan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat atau pemilihan secara langsung. Dalam sejarah islam, pada masa kepemimpinan Rasulullah dan khalifah-khalifah sesudahnya kepala daerah (wali) hanya di angkat melalui khalifah, tidak melalui suara rakyat. Menurut Munawir Sjadzali dalam konsep siyasah syar'iyah di jelaskan bahwasannya ada 6 prinsip yang terdapat di dalam Al-Qur'an yakni kedudukan manusia di bumi adalah sebagai pemimpin, musyawarah, ketaatan, keadilan, persamaan di antara manusia dalam hal ini ingin menjadi seorang pemimpin, dan hubungan baik antar ummat beragama. Dalam kedudukannya siyasah syar'iyah memandang bahwasannya penting dalam prinsip penegakkan HAM yakni setiap manusia berhak menjadi seorang pemimpin dan tidak ada pembatasan dalam mencalonkan seorang pemimpin.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Munawir Sadjzali, *Islam Dan Tata Negara Jilid ke-2*, (Jakarta: UI Press, 2014) h. 43.

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat yang sudah diselidiki dan di pelajari.<sup>2</sup> Sedangkan fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam syari'at Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dengan Tuhannya, sedangkan siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah pengaturan perundangan yang di ciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>3</sup>

Sehingga dapat di simpulkan tinjauan fiqih siyasah adalah pandangan atau pendapat yang mana pandangan tersebut bersumber atau mengambil dari hakikat keilmuan siyasah yakni mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemashlahatan yang sesuai atau berpedoman dari al-qur'an maupun hadist-hadist.<sup>4</sup>

Dalam pemilihan Gubernur, seseorang yang maju sebagai bakal calon harus mempunyai partai politik. Eksistensi partai politik atau keberadaan partai politik menurut pandangan fiqih siyasah tertuang dalam surah Al Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “ <https://kbbi.web.id/tinjau.html> (12 Februari 2012) h. 1

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Dan Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 50

<sup>4</sup> A.Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا  
نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا  
بِالْأَيْمَنِ، وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الضَّالِّمُونَ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim ”. (Qs. Surat Al Hujurat ayat 11).<sup>5</sup>

Maksud dari Surat Al- Hujurat ayat 11 tersebut menjelaskan bahwasannya menurut Ibnu ‘Abbas RA, Mujahid, Sa’id bin Jubair janganlah kalian saling memfitnah satu sama lain, dalam surat Al Hujurat ayat 11 tersebut terdapat kata-kata “ sekumpulan orang lain ” dalam hal ini Rapung Samuddin menjelaskan sekumpulan orang lain tersebut sebagai eksistensi atau keberadaan partai politik yang telah di jelaskan di dalam Al-Qur’an. Maka dari pada itu sekumpulan orang tersebut janganlah merendahkan kumpulan lain atau dalam hal ini partai politik yang satu janganlah memfitnah atau menjatuhkan partai politik lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Sekitar Pemikiran Politik Islam Vol. II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008) h. 22.

<sup>6</sup> Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi Mengungkap Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*, (Gozian Press: Jakarta, 2013), h. 45.



Dalam hal mengangkat seorang pemimpin (*imam*) Munawir Sajadzali menjelaskan bahwasannya pencalonan atau pengangkatan seorang pemimpin telah ada sejak zaman *Khulfaurasyidin* yaitu pada masa pengangkatan Abu Bakar. Pada saat itu kaum anshar mengadakan pertemuan di Saqifah atau balai pertemuan Bani Saidah, Madinah untuk mengangkat Saad Bin Ubadah, seorang kaum anshar dari suku khazraj sebagai khalifah. Akan tetapi Abu Bakar menawarkan dua tokoh quraisy untuk di pilih sebagai khalifah, dua tokoh tersebut adalah Umar Bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarah di karena Abu Bakar takut dan khawatir jikalau seorang khalifah di angkat dari orang orang anshar dari satu suku yang di ketahui sebelum memeluk ajaran islam suku aus dan suku khazraj selalu bermusuhan, apabila di angkat dari salah satu orang dari suku tersebut maka akan timbul perpecahan di kalangan masyarakat Madinah.<sup>7</sup>

Adapun pola pengangkatan Khalifah atau seorang pemimpin Abu Bakar adalah ketika kaum anshar menolak kepemimpinan di tangan kaum muhajirin dengan alasan kaum anshar lah yang telah menampung kaum muhajirin di saat kaum kafir Mekkah memusuhi dakwah Nabi SAW dan umat

---

<sup>7</sup> Munawir Sdajali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 2014) h. 21.

Islam, sementara kaum muhajirin berpendapat bahwasannya merekalah yang berhak meneruskan kepemimpinan sepeninggal Nabi SAW dengan alasan merekalah yang mengalami pahit getir menegakkan agama Islam sejak di Makkah.

Dengan adanya suasana tarik ulur ini maka Umar Bin Khattab mendatangi Abu Bakar untuk membaiaat Abu Bakar kemudian diikuti oleh Abu Ubaidah dan kaum muslimin lainnya sehingga pada akhirnya Abu Bakar lah yang terpilih menjadi seorang khalifah pengganti Rasulullah dengan alasan bahwa Abu Bakar sudah teruji keimanan dan kesetiaannya kepada Rasulullah sehingga dapat diterima oleh golongan muhajirin dan anshar. Seorang khalifah atau pemimpin haruslah berasal dari suku Quraisy yang mana pendapat ini berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad yang berbunyi *al/aimmah min Quraisy* (kepemimpinan itu di tangan orang Quraisy)<sup>8</sup>

Berkaitan dengan calon pemimpin dalam Islam, terdapat dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014) h. 52.

Artinya: “ *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan ( menyuruh kamu ) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat* ” (Qs. An-Nisa:58).<sup>9</sup>

Kemudian juga terdapat pada Al Qur'an surah Al An'aam ayat 165 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “ Dan dia ( Allah ) yang menjadikan kalian penguasa penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian dari diri kalian atas sebagian yang lain beberapa tingkat ”.<sup>10</sup>

Dan juga terdapat pada buku Yusuf Qardhawi yang berjudul Fiqih Negara yang mana Imam Ali Bin Abi Thalib membenarkan adanya eksistensi partai politik yang terdiri dari Sunni, Syi'ah, dan Khawarij. Sunni sebagai partai politik yang mendukung pemerintah sementara Syi'ah dan Khawarij merupakan partai oposisi pemerintah. Akan tetapi Khalifah Ali Bin Abi Thalib tidak membatasi atau melarang setiap partai politik Sunni, Syi'ah, dan

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahannya.

<sup>10</sup> Mohammad Nurhakim, *Politik Alternatif: Suatu Perspektif Islam/Abdul 'Ala Al Maududi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006) h. 7.

Khawarij memberikan kontribusinya kepada pemerintah dan mengajukan calon dari partai tersebut untuk menjadi pemimpin meskipun Syi'ah dan Khawarij selalu memberontak bahkan menghalalkan darah Ali Bin Abi Thalib sendiri.<sup>11</sup>

Menurut kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* hukum hukum penyelenggaraan negara dalam syari'at islam ( terjemahannya ) yang terdapat pada halaman 7 yang mana sekelompok jumur ulama berpendapat bahwasannya memperebutkan jabatan *imamah* atau seorang pemimpin bukan merupakan suatu perbuatan tercela dan terlarang dan mengincar jabatan seorang pemimpin bukan sesuatu yang makruh, artinya siapa saja boleh mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin.

(فصل) وأُمُّ أَهْلِ الْإِمَامَةِ فَالشَّرْطُ الْمَتْرُوفُ فِيمَ سَبْعَةٍ . أَحَدُهَا: الْعَدَالَةُ عَلَى شَرْطِهَا  
الْجَامِعَةِ. وَالثَّنَى: الْعِلْمُ الْوَدِيُّ إِلَى الْاجْتَادِ فِي النِّوَازِلِ وَالْأَحْكَامِ. وَالثَّالِثُ: سَلَامَةُ الْخَوَاسِ  
مِنَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ لِصَحِّ مَعَهَا مَبَاشَرَةٌ مَا يَدْرِكُ بِهَا . وَالرَّابِعُ: سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ مِنْ  
نَقْصٍ يَنْعِي عَنْ اسْتِيفَاءِ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةِ الْهَوَاضِ, وَالْخَمْسُ: الرَّأْيُ الْفَضْلِيُّ إِلَى سِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ  
وَتَدْبِيرِ الصَّالِحِ. وَالسَّادِسُ: الشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ الْمُؤَدِّيَةُ إِلَى حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَجِهَادِ الْعَدُوِّ.  
وَالسَّابِعُ : النِّسْبُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَرِيشٍ لَوْ رُودَ النَّصُّ فِيهِ وَانْعِقَادُ الْإِجَاعِ عَلَيْهِ, وَلَا اعْتِبَارُ  
بُضْرَارٍ حِينَ شَذَّ فَجُوزَهَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ, لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ احْتَجَّ يَوْمَ

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara ( Edisi ke 2 )*, (Jakarta: Robbani Press, 2005) h. 201.

السقيفة على الأنصار في دفعهم عن خلافة لما بايعوا ثعد بن عباد عليها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((الْأَمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ)) فَأَقْلَعُوا عَنْ التَّفَرُّدِ بِهَا وَرَجَعُوا عَنِ السَّارِكَةِ فِيهَا حِينَ قَالُوا مَنَا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ تَسْلِيًا لِرِوَايَتِهِ وَتَصَدِيقًا لِحَبْرِهِ وَرَضُوا بِقَوْلِهِ: نَحْنُ الْأَمْرَاءُ وَأَنْتُمْ الْوُزَرَاءُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

<sup>12</sup>((قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدِّمُوهُمْ))

Abdul Qadir Djaelani dalam bukunya yang berjudul Sekitar Pemikiran Politik Islam mengatakan bahwasannya setiap manusia berhak mencalonkan dirinya sebagai seorang pemimpin dengan syarat tidak mempunyai ambisi untuk menjadi khalifah, calon yang memiliki ambisi untuk menjadi khalifah menurut Ibn Taimiyah gugur haknya untuk di pilih dan menurut Maududi haram untuk dipilih, kemudian muslim yang beraqidah murni dan bebas dari sirik, taat beribadah, berakhlak mulia dan hidup sederhana, istiqomah dalam pendirian, dan mempunyai pengorbanan penuh terhadap islam.

Seperti Rasulullah pernah bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

---

<sup>12</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2014) h. 7.

Artinya: “ *Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya* ”. ( Diriwayatkan Al- Bukhari, Muslim, At-Tarmidzi, dan Ahmad )<sup>13</sup>

Dalam pencalonan Gubernur atau kepala daerah di Indonesia harus di lihat dari segi nilai konstitusi atau undang-undang yang berlaku yang mana terdiri atas 3 nilai yakni konstitusi sebagai nilai normatif, nilai normatif konstitusi adalah konstitusi yang resmi diterima oleh bangsa dan masyarakatnya. Nilai nominal yakni konstitusi yang menurut hukum berlaku akan tetapi tidak sempurna, serta nilai semantik yakni konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa.<sup>14</sup>

Pencalonan Gubernur atau kepala daerah seperti yang dikemukakan dalam PKPU No. 3 Tahun 2017 di jelaskan bahwasannya seseorang yang ingin menjadi bakal calon dalam pemilihan kepala daerah harus memiliki partai politik yang mengusungnya dalam setiap pemilihan kepala daerah. Sehingga partai politik menurut Miriam Budiardjo adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai

---

<sup>13</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Sekitar Pemikiran Politik Islam Vol. II*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2008 ) h.119.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 240.

dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>15</sup>

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>16</sup>

Dapat disimpulkan hak hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945, yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktifitas politik, hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum

---

<sup>15</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 403.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

maupun hak untuk di pilih sebagai warga negara yang merupakan wujud dari persamaan di depan umum tertuang dalam UUD 1945.

Adapun keseluruhan penggunaan hak politik sipil dibedakan atas dua kelompok diantaranya adalah:

1. Hak politik yang di cerminkan oleh tingkah laku politik masyarakat.

Penggunaannya berupa hak pilih dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam organisasi politik dan kesertaan masyarakat dalam gerakan politik.

2. Hak politik yang di cerminkan dari tingkah laku politik elit. Dalam hal ini, tingkah laku elit di pahami melalui tata cara memperlakukan kekuasaan, penggunaan kekuasaan dan bentuk hubungan kekuasaan antar elit dan dengan masyarakat.<sup>17</sup>

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Partisipasi

---

<sup>17</sup> Rasyid Maruf, *Dasar Ilmu Politik*, " [http://www. Slideshare.net](http://www.Slideshare.net) (16 Februari 2013) h. 1.



politik merupakan inti dari demokrasi, demokratis tidaknya suatu sistem politik, ditentukan oleh ada tidaknya atau tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik warga negaranya.<sup>18</sup>

Teori standar minimal demokrasi adalah adanya pemilu reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun, adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam pemilu itu dan dalam proses penentuan kebijakan, terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik dan mengekspresikan pendapat dalam forum publik maupun media massa.

Teori berikutnya yang di gunakan dalam hal hak partai politik dalam mengusung calonnya pada pilkada yang di jamin di dalam Undang-Undang atau disebut dengan hak konstitusional partai politik terdapat pada Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menegaskan secara tersurat bahwasannya: “ *Every citizen shall have the right and the*

---

<sup>18</sup>Miriam Budiardjo, *Partisipasi Dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008) h. 16

*opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:*

- a. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives.*
- b. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.*
- c. To have acces, on general terms of equality, to public service in his country.<sup>19</sup>*

Pada tingkat Undang-Undang yang terdapat pada UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mengacu pada pasal 12 huruf (i) yang berbunyi “ Partai Politik berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pada UU No. 2 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas UU. No. 2 Tahun 2008 pada pasal 12 tidak ada sama sekali

---

<sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Jurnal Konstitusi PPK-FH UNIV. BRAWIJAYA Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Vol. II*, (Jakarta: MK RI, 2009), h. 14.

perubahan, hanya yang mengalami perubahan yaitu pasal 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19, 23, 29, 32, 33, 34, 35, 39, 45, 47, dan pasal 51.<sup>20</sup>

Sementara dilihat dari peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 pada pasal 40, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 pada pasal 40, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1. Tahun 2014, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

PKPU No. 3 Tahun 2017 yang terdapat pada pasal 5 ayat 2 yang berbunyi: “ persyaratan sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir ”.<sup>22</sup>

Dari pernyataan di atas peraturan KPU membatasi seseorang yang berasal dari partai politik untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah dengan syarat 20% jumlah kursi yang ada di DPRD dari partai politik pengusung bakal calon tersebut. Dalam hal ini jikalau calon di usung oleh partai politik akan tetapi partai politiknya tidak memenuhi kursi di DPRD sebanyak 20% maka bakal calon yang di usung dari partai politiknya tersebut tidak bisa maju sebagai bakal calon kepala daerah. Begitu juga dengan syarat 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir, jikalau partai pengusung bakal calon tersebut tidak mencukupi sebanyak 25% maka bakal calon tersebut juga tidak bisa maju sebagai calon kepala daerah.

Sebagai contohnya adalah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 bakal calon dari partai nasdem

---

<sup>22</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Atau/Walikota Wakil Walikota pasal 5 ayat 2.

Tengku Eri Nuradi yang di usung partai nasdem semula berkoalisi dengan partai golkar, akan tetapi dengan kebijakan politik golkar melepas dukungannya terhadap Tengku Eri Nuradi dan memberikan dukungannya terhadap pasangan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksah sehingga Tengku Eri tidak bisa maju sebagai calon kepala daerah petahana yang akan bertarung pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara dikarenakan partai nasdem tidak mencukupi perolehan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara sebanyak 20% yang ditetapkan oleh KPU dan 25% akumulasi suara sah dari pemilihan sebelumnya.<sup>23</sup>

Sebelum berlakunya PKPU No. 3 tahun 2017, pada tahun 2013 tepatnya di Kabupaten Lebak Banten mengadakan pemilihan Bupati. Partai politik yang mengusung calonnya diperbolehkan mengusung masing-masing kandidat bakal calonnya dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Lebak Banten, adapun calon yang di usung oleh PDIP tersebut bernama Iti Oktavia Jayabaya, sementara partai PDIP hanya menduduki 10 kursi di DPRD Tangerang, artinya hanya sebesar 10% partai PDIP yang duduk di kursi DPRD Tangerang. Iti Jayabaya bisa maju sebagai calon Bupati Tangerang

---

<sup>23</sup> Effan Zulfikar, “Dilema Partai Nasdem Di Pilgubsu 2018,” <http://dilemapartainasdem.dalam.pemilihan.Gubernur.Sumatera.Utara.wordpress.go.id> (11 Juli 2018), h. 1.

dari partai politik PDIP tanpa hambatan yang cukup berarti untuk maju sebagai calon Bupati yang akan di dampingi oleh Ade Sumardi.<sup>24</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang mana PKPU No. 3 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 pada pasal 40, Undnag-Undang No. 1 Tahun 2015 Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, UU. No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UU. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada pasal 12 huruf (i) yang menjelaskan hak dari pada partai politik yakni partai politik berhak mencalonkan bakal calonnya pada pilkada sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai Hak Konstitusional Partai Politik Dalam Mencalonkan Bakal Calon Pada Pemilihan Gubernur Di Sumatera Utara Tahun 2018.

---

<sup>24</sup> Detik Indonesia, “ *Pilkada Di Kabupaten Tangerang Dan Lebak Banten,*” <http://detik.com> *Pilkada serentak di Kabupaten Lebak Banten* (05 Juli 2018).

## **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis disini merumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme/persyaratan pencalonan Gubernur menurut peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana pandangan fiqih siyasah dalam pemilihan seorang pemimpin?
3. Bagaimana analisis terhadap pemilihan Gubernur Sumatera Utara berdasarkan Fiqih Siyasah dan peraturan perundang-undangan ?

## **B. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis, penulis memiliki tujuan pemelitian diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme atau persyaratan pencalonan Gubernur atau pemilihan kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih jelas mengenai pemilihan seorang pemimpin (*imam*) menurut pandangan fiqih siyasah.

3. Untuk mengetahui sejauh mana proses atau mekanisme pencalonan bakal calon dalam pemilihan Gubernur atau kepala daerah.

### **C. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tonggak awal kajian teoritis mengenai hak konstitusional partai politik dalam pemilihan kepala daerah yang bermanfaat bagi keilmuan siyasa khususnya.
2. Secara praktis maka di harapkan pada hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada suatu negara khususnya di Indonesia.

### **E. Metode Penelitian**

Metode yang secara pengertiannya adalah cara bertindak menurut sistem dan aturan tertentu. Maksud dari metode adalah supaya kegiatan praktis terlaksana dengan rasional dan terarah serta mencapai hasil yang optimal.



## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan buku utama, menelaah yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya adalah asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung.<sup>25</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang di lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan

---

<sup>25</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007) h. 145

perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang merujuk pada kaidah-kaidah.<sup>26</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Merupakan data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian ini atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang di teliti yaitu penelitian ini menjelaskan berdasarkan data PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 93.

#### b. Data Sekunder

Merupakan sumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku buku, literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian.

#### c. Data Tersier

Merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, dalam hal ini adalah kamus Ensiklopedia, dan internet.

#### d. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian amat yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, dan tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian ini.

#### e. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis mengkualifikasikan data data yang bersifat umum, dan kemudian

diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data yang diperoleh disusun dan dideskripsikan.<sup>27</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Konstitusi**

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu *constitutio* yang artinya undang-undang dasar. Konstitusi dapat diartikan sebagai peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur, mengikat cara menyelenggarakan pemerintah dalam masyarakat negara.

Dalam pengertian modern, konstitusi adalah seperangkat aturan dasar ketentuan yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi merupakan undang-undang dasar, yaitu dokumen resmi yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Kedudukan konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam negara. Adapun fungsinya adalah penentu dan

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Bahan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 110.

pembatas kekuasaan, serta sebagai pengatur hubungan antara rakyat dengan negara.<sup>28</sup>

## 2. Partai Politik

Menurut Syaibani mendefenisikan partai politik sebagai suatu kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah melalui pemilu.

Partai politik sebagai salah satu sarana untuk berpartisipasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan kekuasaan untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Zulkarnaen, *Hukum Konstitusi*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2012), h. 34.

<sup>29</sup> Muhammad Ibnu Qarim, “ *Partai Politik, defenisi, dan tujuan Serta Fungsi* ,” <http://www.partai politik.com>(12 Juli2012), h. 12.

### 3. Hak dan Kewajiban Partai Politik

Hak partai politik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yakni:

- Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.
- Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
- Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

---

<sup>30</sup> Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 12 huruf (i).

Bab Pertama Pendahuluan. Dalam bab ini penulis memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Pencalonan Gubernur Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai: pencalonan gubernur menurut peraturan perundang-undangan

Bab Ketiga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai: bagaimana biografi komisi pemilihan umum provinsi sumatera utara.

Bab Keempat Analisis Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 menurut fiqh siyasah. Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai: bagaimana analisa pemilihan gubernur di sumatera utara di tinjau dari fiqh siyasah.

Bab Kelima Penutup. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini dan juga saran atau rekomendasi yang relevan terkait dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **PENCALONAN GUBERNUR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **A. Mekanisme Pencalonan Gubernur Menurut Peraturan Perundang-undangan**

##### **1. Peraturan Perundang-undangan**

- a. Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang di buat, di tetapkan dan di keluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.<sup>31</sup>
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang di bentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>32</sup>
- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pengertian

---

<sup>31</sup> Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 39.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 40.



peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau di tetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat di temukan unsur-unsur peraturan perundang-undangan yaitu: peraturan tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara, melalui prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan mengikat secara umum.<sup>33</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Indonesia adalah negara hukum dalam hal ini konsep negara hukum berkaitan erat dengan konsep perundang-undangan itu sendiri. Menurut Arief Sidharta, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum, yaitu meliputi 5 hal yakni sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, (Depok Timur: Papas Sinar Sinanti, 2013), h. 14-15.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 33.

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum, negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *predictable*. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum, asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan, asas non retro aktif perundang-undangan dan asas peradilan bebas.
3. Berlakunya persamaan (*Similia Similibus* atau *Equality Before The Law*). Dalam negara hukum pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok tertentu atau mendiskriminasikan kelompok tertentu.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 48.

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu di wujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil, pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban oleh badan perwakilan rakyat, dan semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah.

5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Peraturan perundang-undangan memiliki hierarki yang mana secara yuridis, di dalam penjelasan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hierarki yakni penjenjangan setiap jenis

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 49.

peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang.
4. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah.
6. Peraturan Presiden.
7. Peraturan Daerah Provinsi.
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## **2. Mekanisme pencalonan Gubernur**

Adapun mekanisme pencalonan Gubernur menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi bahwasannya setiap calon Gubernur harus

memiliki kendaraan partai politik atau dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dengan cara pencalonan secara individu.

a. Sistem Kepartaian Politik

Sejarah kehidupn dan pertumbuhan partai politik mulai di kenal dalam bentuk yang modern di Eropa dan Amerika Serikat sekitar abad ke-19 bersamaan mulai dikenalkan sistem pemilihan dan parlementer. Sepanjang perkembangan dan kemajuan sistem pemilihan dan parlemen ini, maka berkembang pula sistem kepartaian politik. Istilah partai yang melekat pada partai politik digunakan untuk setiap bentuk kelompok organisasi yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik baik melalui pemilihan yang demokratis atau revolusi.<sup>37</sup>

Partai politik berbeda dengan bentuk organisasi lainnya, ia merupakan *a special kind of political organization*. Di dalam negara yang demokratis maupun negara ooritarian partai politik berbeda dengan asosiasi politik lainnya yang ada, seperti

---

<sup>37</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014) h. 97

kelompok penekan. Partai politik merupakan organisasi yang berhubungan dengan kekuasaan melalui cara pemilihan yang demokratis. Oleh karena itu, partai politik bekerja melalui mekanisme perwakilan di dalam pemerintahan seperti di lembaga perwakilan rakyat. Berbeda dengan kelompok penekan, kelompok ini bekerja tidak ada kaitannya dengan dua mekanisme demokrasi tersebut yakni pemilihan perwakilan.

Sepanjang perkembangan dan kemajuan sistem pemilihan dan parlementer, maka berkembang sistem kepartaian politik. Istilah partai yang melekat pada partai politik di gunakan untuk setiap bentuk kelompok organisasi yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik baik melalui pemilihan yang demokrasi atau revolusi.<sup>38</sup>

#### b. Tinjauan Yuridis Pemilihan Gubernur Menurut Undang-Undang

Adanya pemilihan kepala daerah atau Gubernur merupakan konsekuensi pembagian wilayah NKRI kedalam wilayah daerah

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 99.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, seperti yang telah di kemukakan bahwa tiap-tiap provinsi dibagi atas kabupaten/kota. Provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah sendiri.<sup>39</sup>

Pada pemilihan pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota menurut Undang Undang yang terdapat pada Pasal 18 UUD 1945 harus di pilih secara langsung melalui pemilihan umum. Dan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terdapat pada pasal 40 yang mengatur mengenai pemilihan Gubernur bersumber dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang berbunyi:

1. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari

---

<sup>39</sup> Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 144.

akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah bersangkutan.

2. Dalam hal ini partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi di hitung dengan pembulatan keatas.

3. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



4. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 pasangan calon.<sup>40</sup>

## **B. Dasar Hukum Partai Politik Mengusulkan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur**

### **1. Aspek HAM Sebagai Konsep Dalam Pilkada**

Pilkada merupakan pemilihan umum untuk memilih pasangan kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilu untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat di parlemen maupun memilih kepala negara atau kepala daerah adalah satu

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 40.

mekanisme penting dalam kehidupan demokrasi. Melalui pemilu warga negara akan menggunakan haknya untuk turut menentukan arah kehidupan bernegara dengan cara memilih wakil wakil mereka.

Sementara pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwasannya dengan menyebutkan setiap warga negara berhak untuk di pilih dan memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam standart penegakan HAM , maka pelaksanaan pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan:

- a) Hak untuk berperan dalam pemerintah (*right to take part in government*)
- b) Hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and to be elected*)
- c) Hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan publik (*right to equal acces to public service*)

Di Indonesia hak asasi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan diatur secara khusus dalam UUD 1945 amandemen ke-4, Pasal 28 D ayat 3 yang menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Menurut Robert A Dahl (1971) dalam satu studinya menyimpulkan pelaksanaan pemilu yang bebas dan berkeadilan serta berintegritas akan sangat berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik sosial politik secara damai, sebaliknya pemilu yang manipulatif yang berkorelasi positif dengan kekerasan dan ketidakstabilan politik. Hal itulah yang menjadi peran pokok pemilu dalam berdemokrasi.

Dengan kata lain pemilu yang diharapkan dapat menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia adalah pemilu yang dilaksanakan dengan integritas. Dalam konteks penghormatan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia pemilu yang diselenggarakan secara berkala dengan prinsip-prinsip *luber-jurdil*.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h. 98-108.

## **2. Analisis Undang-Undang No. 2 Tahun 2008**

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menjelaskan bahwasannya ada beberapa point penting yang membahas mengenai hak dari partai politik yang terdapat pada Pasal 12 yang berbunyi:

- a. Partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.
- b. Partai politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
- c. Partai politik berhak memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Partai politik berhak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Partai politik berhak membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Partai politik berhak mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Partai politik berhak mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Partai politik berhak mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Partai politik berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- j. Partai politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik.
- k. Partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

## **C. Peran Partai Politik Dalam Proses Pencalonan Pemilihan**

### **Gubernur**

#### **1. Partai Politik**

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dari partai politik tersebut. Menurut Carl. J. Friedrich mendefenisikan partai politik adalah sekelompok manusia

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 12 huruf (i).

yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil.

## **2. Peran Partai Politik**

Partai sebagai organisasi politik mempunyai kewajiban untuk mencetak kader yang berkualitas dan tentu juga mempunyai kapabilitas untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam lingkup umum, partai politik menjadi alat untuk kadernya yang ingin menduduki jabatan struktural elit baik itu jabatan Bupati, Walikota, Gubernur, dan Presiden merupakan jabatan yang dapat di peroleh melalui partai politik. Kehadiran partai politik dalam mendorong kadernya dan mempunyai massa sendiri tentu lebih mudah dalam memenangkan kontestasi pemilihan umum ketimbang menempuh melalui jalur independen.

Dalam merealisasikan cita-cita politik tentu membutuhkan strategi politik. Menurut pandangan dari Peter Schroder ada beberapa point

mengenai konsep strategi politik, konsep tersebut diantaranya adalah merumuskan misi, penilaian situasional dan evaluasi, perumusan sub strategi, perumusan sasaran, target image, kelompok-kelompok target, instrumen strategi, pesan kelompok target, implementasi strategi, dan pengendalian strategi. Konsep-konsep tersebut merupakan beberapa langkah yang harus di jalankan partai politik guna melancarkan dan merealisasikan cita-cita politiknya.

Dan adapun peran dari partai politik menurut Miriam S Budiardjo diantaranya adalah:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik.

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga perbedaan pendapat di dalam masyarakat berkurang. Komunikasi politik yakni proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada rakyat atau sebaliknya.



## 2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik.

Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai proses melalui yang mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa anak-anak sampai dengan masa dewasa. Selain itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui yang mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

## 3. Partai sebagai sarana rekrutmen politik.

Partai politik mempunyai fungsi sebagai sarana dalam melakukan seleksi dan pemilihan serta pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

## 4. Partai sebagai sarana pengatur konflik (*Conflict Management*)

Partai politik berfungsi sebagai mengendalikan konflik melalui dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan

memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan serta membawa permasalahan kedalam musyawarah dalam badan perwakilan rakyat (DPR) untuk mendapat penyelesaian berupa keputusan politik.

5. Partai sebagai sarana partisipasi politik.

Partai politik memiliki peran sebagai wadah bagi warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum serta ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

6. Partai politik sebagai pemandu kepentingan.

Partai politik juga memiliki peran untuk melakukan kegiatan untuk menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi beberapa kebijakan alternatif.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001)  
h. 69.

### **BAB III**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

##### **A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum**

###### **1. Pemilihan Umum**

Menurut Ramlan Surbakti pemilihan umum adalah pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang di percayai. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1 yang di maksud pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun tujuan pemilihan umum menurut Prihatmoko pemilu memiliki tiga tujuan yakni:

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).

- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c. Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya menurut Humtingthon pemilu dalam pelaksanaannya memiliki 5 tujuan yakni:

1. Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat
2. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik.
3. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.
4. Pemilu sebagai sarana pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik.

## **2. Sejarah, Tugas, Dan Wewenang KPU Sumatera Utara**

Pada pemilu 1955 ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau di katakan syarat pemilu di Sumatera Utara adalah berusia 10 tahun. Tiga bulan setelah di proklamasikannya kemerdekaan oleh Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta maka pemerintah pada waktu itu ingin mengadakan pemilu di setiap provinsi. Dalam Maklumat X atau maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945 berisi anjuran tentang pembentukan partai politik.

Melalui Maklumat X atau maklumat Wakil Presiden yang di keluarkan pada tanggal 3 November 1945 maka di bentuklah partai politik dan Sumatera Utara mengadakan pemilihan Gubernur pertama kali pada tahun 17 Juni 1948. Pada saat itu Gubernur yang terpilih adalah Sultan Muhammad Amin Nasution.

Komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi

pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

Adapun tugas dan wewenang KPU yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum Komisi Pemilihan Umum, di jelaskan bahwasannya untuk melaksanakan Pemilihan Umum KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum.
2. Menerima, meneliti, dan menetapkan partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum.
3. Membentuk panitia pemilihan Indonesia yang selanjutnya di sebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yaang selanjutnya di sebut TPS.

4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum.
7. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.<sup>44</sup>

## **B. Biografi KPU Provinsi Sumatera Utara**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga negara yang melaksanakan pemilihan umum di Provinsi Sumatera Utara tepatnya pada saat pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2018. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Gaharu, Medan, Kota Medan Sumatera Utara.

Adapun profil dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara diantaranya:

---

<sup>44</sup> Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 77.

1. Nama : Ir. Benget Manahan Silitonga

Jabatan: Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

2. Nama : Nazir Salim Manik S. Sos M.SP

Jabatan: Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

3. Nama : Mulia Banuera Sag M.Si

Jabatan: Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

4. Nama : DR. Abd. Rajab M.M

Jabatan: Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

5. Nama : Yulhasni S.S

Jabatan: Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

6. Nama : Dr. Iskandar Zulkarnain M.Si

Jabatan: Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Visi dan Misi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

diantaranya adalah:

1. Visi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara adalah

terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara

pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri,

transparan, dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang



berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara adalah membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien, dan efektif. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk

berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.<sup>45</sup>

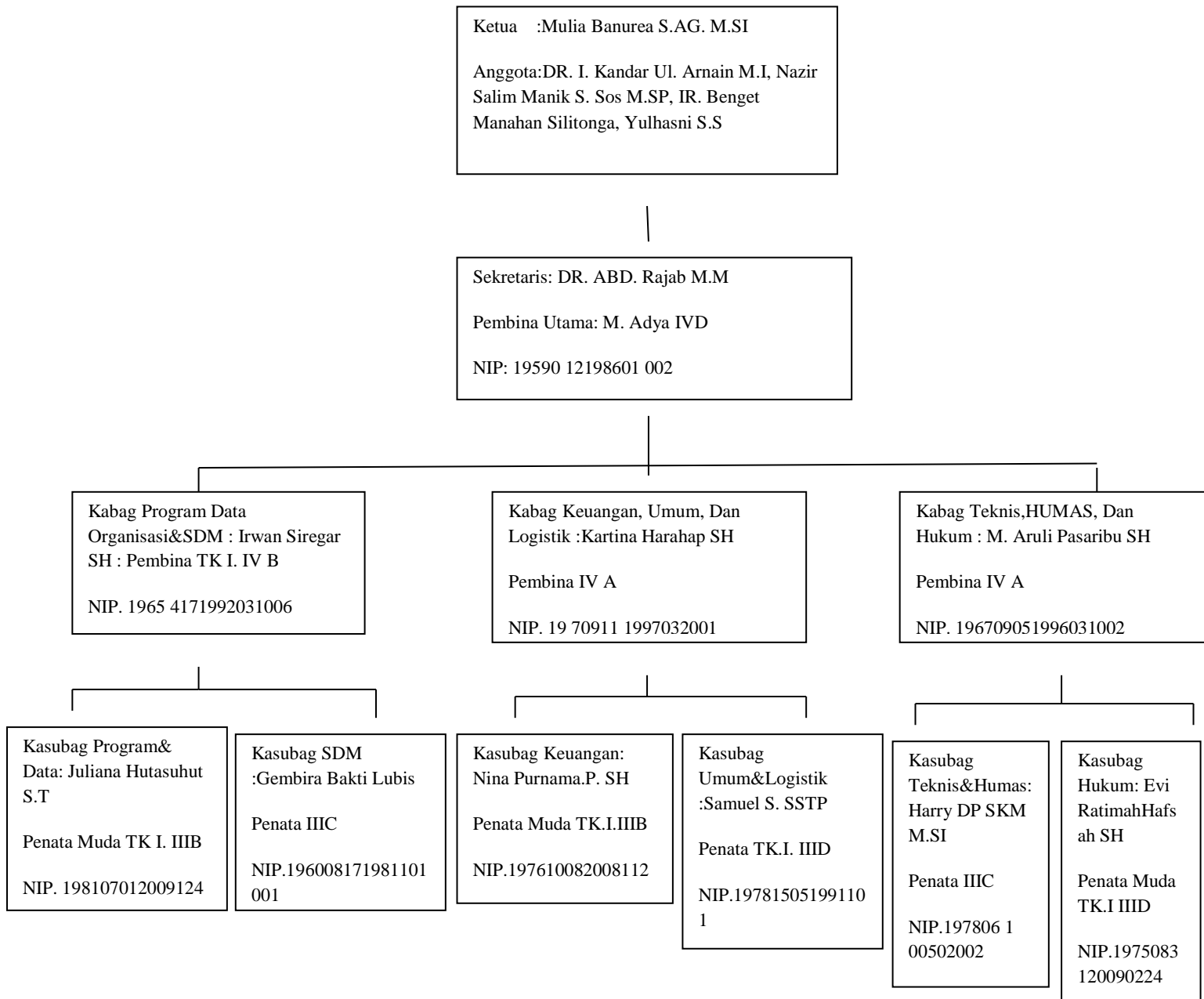
### **C. Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Utara**

Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Jadi dapat di simpulkan bahwasannya struktur organisasi KPU Provinsi Sumatera Utara adalah sejumlah susunan yang mana terdiri atas bagian-bagian yang ada di dalam KPU Provinsi Sumatera Utara mulai dari ketua hingga anggota-anggotanya.

---

<sup>45</sup> Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, “ *Daftar Anggota Komisioner KPU Provinsi SUMUT,* ” <http://KPUD-Sumutprov.go.id> ( 18 September 2018 ).

Berikut ini struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara:



## **BAB IV**

### **ANALISIS AMBANG BATAS PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018 MENURUT FIQIH SIYASAH**

#### **A. Analisis Pemilihan Gubernur Di Sumatera Utara Menurut**

##### **Fiqih Siyasah.**

Pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 di laksanakan pada 27 Juni 2018 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023. Jadwal pemilihan serentak gelombang ketiga akan di laksanakan pada Juni 2018. Adapun menurut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara jumlah kehadiran pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang di laksanakan pada 27 Juni 2018 tersebut sebanyak 61, 78%. Yang maju sebagai calon Gubernur pada pemilihan Gubernur tahun 2018 ini adalah Edy Rahmayadi dan Djarot Saiful Hidayat, Edi Rahmayadi di dukung oleh partai Gerindra sementara Djarot Saiful Hidayat di dukung oleh partai

PDIP, dan pendampingnya Edy Rahmayadi adalah Musa Rajeksyah sementara Djarot Saiful Hidayat Sihar PH Sitorus.<sup>46</sup>

Melalui pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 yang terdapat dalam PKPU NO. 3 Tahun 2017 syarat minimum jumlah kursi atau jumlah suara sah sebagai syarat pencalonan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 115/PP.02.3-Kpt/12/Prov/X/2017 yang mana terdapat perolehan kursi partai politik dan suara sah partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014, berikut tabelnya:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH
1	PARTAI NASDEM	5	423,216
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	304,513
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	9	450,451
4	PDIP	16	920,672
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	17	918,535
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA	13	673,685

---

<sup>46</sup> Tribun Medan, “ Pilgub Sumut 2018, ” <http://medan.tribunnews.com> (8 Juli 2018)

	RAYA		
7	PARTAI DEMOKRAT	14	822,871
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	420,433
9	PPP	4	295,434
10	PARTAI HANURA	10	506,463
11	PARTAI BULAN BINTANG	-	171,705
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	3	267,687
	TOTAL	100	6,205,665

Adapun penetapan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 beserta menetapkan koalisi partai politik diantaranya adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA/2018	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI
1	CALON GUBERNUR : <b>EDY RAHMAYADI</b>  CALON WAKIL GUBERNUR : <b>MUSA RAJEKSHAH</b>	PKS, HANURA, GOLKAR  PAN, GERINDRA,  NASDEM	60 KURSI
2	CALON GUBERNUR : <b>DJAROT SAIFUL HDYT</b>  CALON WAKIL GUBERNUR :  <b>SIHAR PH SITORUS</b>	PARTAI PPP  PDIP	20 KURSI

Sementara analisis fiqh siyasah dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 adalah manusia di ciptakan sebagai pemimpin atau *khalifah* di muka bumi, hal tersebut berlandaskan kepada firman Allah yang terdapat pada Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 30 yang terjemahannya adalah “ *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi* ”. Quraish Shihab di dalam Tafsir Al Misbah mengatakan bahwa ayat ini merupakan penyampaian Allah kepada para malaikat tentang menciptakan manusia di muka bumi dan menjadikan manusia sebagai seorang pemimpin di muka bumi.

Sementara dalam pandangan Al Mawardi orang yang berhak menjadi pemimpin harus memiliki beberapa syarat sebagai berikut diantaranya adalah seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil dengan segala persyaratan yang telah di tentukan. Kedua seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang memadai membuatnya dapat melakukan sebuah ijtihad untuk menghadapi kejadian yang akan timbul mendatang dan untuk membuat kebijakan hukum. Ketiga seorang pemimpin harus sehat dan tidak cacat fisiknya, artinya sehat penglihatan,

sehat pendengaran, dan sehat sebagainya sehingga dapat menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Keempat tidak ada kekurangan anggota tubuh yang menghalanginya untuk bergerak cepat dan bangun. Dan kelima memiliki kemampuan untuk berijtihad dengan baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan. Keenam seorang pemimpin harus memiliki sifat keberanian dan sifat menjaga rakyat yang membuatnya mempertahankan rakyat dan memerangi musuhnya.<sup>47</sup>

Dalam hal pemilihan Gubernur di Sumatera Utara, fiqih siyasah tidak ada mengatur dalam hal pemilihan seorang pemimpin harus memiliki syarat sebanyak 20% partai pendukung agar maju sebagai seorang pemimpin dalam hal ini menjadi seorang Gubernur. Fiqih siyasah hanya melihat dalam hal memilih seorang pemimpin seperti yang di kemukakan oleh Al Mawardi dan tidak merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tersebut hampir memenuhi kriteria dalam pemilihan seorang pemimpin menurut tinjauan fiqih siyasah, akan tetapi dalam hal

---

<sup>47</sup> Al Fajar Nugraha, “ *Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fiqih Siyasah* ”, *Jurnal Hukum Islam* XV, 2, (Desember 2016): 214.



penerapan ambang batas sebanyak 20% suara sah di DPRD (*Majelis Syura*) maka hal tersebut mempersulit seseorang untuk mencalonkan sebagai seorang pemimpin. Sementara dalam fiqih siyasah seorang manusia di muka bumi merupakan seorang *khilafah* atau pemimpin, maka dalam hal ini siapapun itu berhak menjadi seorang pemimpin tanpa harus di batasi oleh dukungan oleh sejumlah golongan atau kelompok.<sup>48</sup>

## **B. Analisis Fiqih Siyasah Dalam Pemilihan Seorang Pemimpin**

### **1. Pengertian Fiqih Siyasah**

Kata Fiqih berasal dari *fuqoha-yafqahu-fiqhan*. Fiqih adalah semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum syara', sedangkan secara bahasa fiqih adalah paham yang mendalam, sedangkan secara terminologis fiqih merupakan mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Fiqih adalah ilmu yang dihasilkan oleh fikiran serta ijtihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan

---

<sup>48</sup> Mohammad Sofyan, " *Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara Tahun 2018 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah*, " <http://www.pilkadasumut.dalam.siyasah.com> ( 18 Agustus 2018), h. 1.

bahwa fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahid*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.

Sedangkan kata siyasah menurut bahasa berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan. Sedangkan secara terminologis siyasah berarti hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan negara serta penegakan hukum adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah SWT maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf mendefenisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan, dan Ibn Taimiyah juga turut mendefenisikan *siyasah* adalah sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.

## **2. Pandangan Siyasah Syar'iyah**

Menurut Abdul Wahhab Khallaf siyasah syariyyah adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan maslahat, mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat) melalui batasan-batasan yang ditetapkan oleh syara' dan prinsip-prinsip umum syari'at (*maqasidus syari'ah*). Dan menurut Abdul Wahab Khallaf siyasah syar'iyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.

Dari definisi yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf definisi tersebut juga ditegaskan oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi tercapainya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Sedangkan Fathih Bahansi merumuskan siyasah syar'iyah adalah

pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara'.

Menurut Farid Abdul Khaliq tujuan siyasah syar'iyah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Paradigma dan konsep politik dalam islam, yang secara garis besar mencakup kewajiban mewujudkan kepemimpinan yang islami (khalifah) dan kewajiban menjalankan syari'at islam (hukum islam).
2. Regulasi dan ketetapan hukum yang di buat oleh pemimpin atau imam dalam rangka menangkal dan membasmi kerusakan serta memecahkan masalah-masalah yang bersifat spesifik.
3. Partisipasi aktif setiap muslim dalam aktifitas politik baik dalam rangka mendukung maupun mengawasi kekuasaan.<sup>49</sup>

Seperti di ketahui siyasah syar'iyah merupakan kajian ilmu yang mana mengatur urusan pemerintahan secara menyeluruh dengan cara mewujudkan maslahat dan mencegah terjadinya kerusakan

---

<sup>49</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 25-39.

melalui batasan-batasan yang telah di tentukan oleh syara' dan prinsip-prinsip umum dari syari'at, dan siyasah syari'ah merujuk kepada sumber hukum yang di muat baik itu di dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah (hadist).

Pandangan siyasah syar'iyah mengenai pembatasan seseorang untuk mencalonkan seorang pemimpin merujuk pada konsep yang di terapkan di dalam Al-Qur'an yakni adanya konsep adil dan konsep Hak Asasi Manusia yang mana di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan bahwasannya setiap orang muslimin di perintahkan untuk berlaku adil bagi sesama muslim lainnya. Dalam hal pembatasan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin di kemukakan oleh Ibn Taimiyah yang berkata: “ Jujur dalam setiap berita dan berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan, cocok dalam setiap keadaan. Jujur dan adil ini selalu berdampingan ”. Dari ucapan Ibn Taimiyah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya dalam penegakan sebuah peraturan yang di terapkan oleh penguasa dalam hal ini pemerintah haruslah merujuk kepada konsep adil yang mana adanya prinsip persamaan hak dan

kebebasan serta hak asasi manusia untuk menjadi seorang pemimpin.

Ibn Taimiyah juga berpendapat bahwasannya rakyat adalah yang memilih penguasa agar dia melaksanakan hukum-hukum syari'at dan memperhatikan kemaslahatan. Penguasa tetap seperti individu dalam hal ini adalah rakyat namun dia mempunyai beban dan tanggung jawab yang lebih banyak. Jadi setiap peraturan yang di buat oleh seorang *imam* atau seorang pemimpin haruslah merujuk kepada Al-Qur'an dalam hal ini setiap individu berhak untuk menjadi seorang pemimpin tanpa ada batasan kepada dirinya tersebut. Asy-Syathibi berkata: “ Sesungguhnya melihat melihat atau mempertimbangkan makna telah dikenal di masa-masa lalu dan telah menjadi pegangan para pakar, hingga sesuai dengan kemaslahatan mereka ”. Contohnya seperti prinsip-prinsip musyawarah, berlaku adil, dan persamaan hak dalam hal ini

seseorang tidak ada pada dirinya pembatasan untuk bagi dirinya sebagai seorang pemimpin.<sup>50</sup>

Dalam buku Fikih Politik Islam karangan Farid Abdul Khaliq mengatakan bahwasannya pandangan siyasah syar'iyah bahwasannya persamaan antara manusia dalam dua dasar menuntut tidak menjadikan perbedaan mereka dalam jenis, warna, kulit, dan keturunan sebagai tolak ukur keutamaan atau permusuhan, sebab kebijaksanaan Allah telah memutuskan bahwa maksud perbedaan ini adalah untuk saling mengenal dan saling membantu antara ummat dan bangsa. Dalam saar hukum mengenai pandangan siyasah syar'iyah mengenai pembatasan pencalonan seorang pemimpin terdapat dalam Qs. Al-Isra ayat 70 yang artinya: “ *Dan kami sesungguhnya telah memuliakan anak-anak Adam* ”. maksud ayat ini adalah tanggung jawab manusia seluruhnya terhadap segala jenis pelanggaran kemuliaan anak Adam, tanpa memandang jenis, warna

---

<sup>50</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 201-221.

kulit, bahasa, agama, partai, dan lain-lainnya dari perbedaan-perbedaan yang terjadi diantara manusia dan umat.<sup>51</sup>

Adapun implementasi dari siyasah syar'iyah dalam pembuatan undang-undang dalam hal ini PKPU No. 3 Tahun 2017 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-musawwah*).
3. Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya (*'adam al-haraj*).
4. Menciptakan keadilan di dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*).
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf'i al mafasid*).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 222.

<sup>52</sup> Zoubya Journal, *Journal Fiqih Siyasah Pendalaman Siyasah Syar'iyah Mengenai Peraturan Perundang-Undangan DI Indonesia Vol. I* (Jakarta: Zoubya Journal, 2008), h. 11.



### **3. Pandangan Siyasah Dusturiyah**

Siyasah dusturiyah adalah suatu kajian ilmu fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini di bahas mengenai kosntitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Adapun permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.

Adapun ruang lingkupnya diantaranya adalah:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan).
2. Persoalan imamah, hak, dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya.
4. Persoalan bai'at.
5. Persoalan *waliyul ahdi*.
6. Persoalan perwakilan.

7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
8. Persoalan *wizaroh* dan perbandingannya.

Apabila di lihat dari sisi lain siyasah dusturiyah dapat di bagi kepada:

1. Bidang siyasah *tasri'iyah* termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang siyasah *tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizaroh*, *waliy wal ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah *qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah *idariyah*, termasuk di dalamnya adalah masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>53</sup>

Adapun pandangan siyasah Dusturiyah mengenai pembatasan seseorang untuk mencalonkan sebagai seorang pemimpin adalah mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

---

<sup>53</sup> Ahmad Djazuli , *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 47.

dalam hal ini terdapat adanya pembatasan pencalonan sebagai seorang Gubernur, siyasah dusturiyah menilai dari segi peraturan yang di buat oleh pemerintah tersebut tidak sesuai ketentuan yang di jelaskan dalam kajian fiqih siyasah bahwasannya setiap orang tidak ada batasan pada dirinya untuk menjadi seorang pemimpin, dengan adanya rujukan kajian fiqih siyasah maka dalam siyasah dusturiyah dalam pengkajian perundang undangannya yang termasuk dalam kajian siyasah dusturiyah *tasri'iyah*.

Dalam kajian siyasah dusturiyah *tasri'iyah* di jelaskan bahwasannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah di jelaskan terdapat adanya jaminan bahwasannya setiap orang berhak untuk menjadi seorang pemimpin dan jaminan tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Kajian siyasah dusturi'yah seperti di jelaskan dalam persoalan *waliy al- ahdi* (pengangkatan kekuasaan), Qadli Abu Ya'la mengatakan bahwasannya: “ orang yang di tujuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imamah tidaklah terjadi semata-mata penunjukan, akan tetapi imamah itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin.”

Dari keterangan tersebut di jelaskan bahwasannya jika seorang anak khalifah dapat saja jadi khalifah, asal anak khalifah tadi memenuhi syarat sebagai seorang khalifah serta pengangkatannya di setuju oleh setidaknya mayoritas *ahlul halli wal aqdi*, akan tetapi juga sebaliknya seseorang yang tidak punya hubungan dengan khalifah, dapat menjadi khalifah apabila dia yang paling memenuhi persyaratan serta di setuju oleh *ahlul halli wal aqdi*.<sup>54</sup>

Dan untuk mengangkat seorang imam (pemimpin) Al Mawardi memberikan syarat yang cukup ketat untuk di angkat menjadi seorang pemimpin diantaranya adalah pertama adil dengan segala persyaratannya (benar tutur katanya, dapat di percaya, terpelihara dari segala yang haram, menjauhi segala dosa dan hal-hal yang meragukan, memegang *ma'ruah*, kedua adalah memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus kasus hukum yang harus di pecahkan, ketiga sehat pancainderanya baik pendengaran maupun penglihatan dan lisannya agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 48-49.

(فصل) وأُم أهل الإمامة فالشر وط المتر ة فيم سبعة . أ حدها: العدا لة عل شروطها ا  
لجامعة. والثنى: العلم الؤ دى إلى الاجتاد فى النوازل والأحكام. والثالث: سلامة الحواس  
من السمع والبصر والسان لصح معها مباشرة ما يدرك بها . والرابع: سلامة الأعضاء من  
نقص ينع عن استيفاء الحركة وسرعة الهوض, والخمس: الرأى الفضى إلى سياسة الرعية  
وتدبير الصالح. والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة و جهاد العدو.  
والسابع : النسب وهو أن يكون من قریش لو رود النص فيه وانعقاد الاجاع عليه, ولا اعتبار  
بضرار حين شذ فجزها فى جميع الناس, لأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه احتج يوم  
السقيفة على الأنصار فى دفعهم عن اخلافة لما بايعوا ثعد بن عباد عليها بقول النبى صلى  
الله عليها وسلم ((الَاء عَمَة مِنْ قُرَيْشٍ)) فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن الساركة فيها  
حين قالوا منا أمير ومنكم أمير تسلياً لروايته وتصديقاً لحبره ورضوا بقوله: نحن الأ  
مرء و أنتم الوزراء, وقال النبى صلى الله عليه وسلم:  
((قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدِّمُوهَا ))

Sedangkan menurut Ibn Taimiyah mengatakan bahwasannya  
tidak mengharuskan memilih seorang penguasa dalam hal ini imam  
harus memiliki saksi yang lebih dari seseorang yang dapat di  
percayaanya, saksi dalam hal ini adalah bentuk dari koalisi atau  
gabungan partai politik yang di jelaskan dalam PKPU No. 3 Tahun

2017 agar individu tersebut dapat mencalonkan diri menjadi seorang Gubernur (pemimpin).<sup>55</sup>

### **C. Analisis Pemilihan Seorang Pemimpin Dan Dalil-Dalil Mengenai Mencalonkan Menjadi Pemimpin Dalam Konteks Ketatanegaraan Islam**

#### **1. Pemilihan Seorang Pemimpin Pada Masa *Khulafaurasyidin***

##### **a. Masa Abu Bakar al-Shiddiq**

Persoalan pertama yang muncul setelah nabi Muhammad SAW wafat pada 632 M/10 H adalah suksesi. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW memang tidak menunjuk siapa yang akan menggantikan kepemimpinannya kelak. Beliau juga tidak memberi petunjuk tentang tata cara pengangkatan penggantinya. Ketiadaan petunjuk ini menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam setelah Muhammad SAW wafat, sehingga hampir membawa perpecahan antara kaum Muhajirin dan Anshar.

---

<sup>55</sup> Abudul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogya: Tiara Wacana, 1994), h. 17.

Sehari setelah Rasulullah wafat, kaum Anshar memprakarsai musyawarah besar di Tsaqifah Bani Sa'idah. Mereka sibuk membicarakan siapa yang di angkat menjadi khalifah pengganti kekuasaan politik Nabi. Dalam pertemuan itu suku Khazraj menunjuk Sa'ad ibn 'Ubadah sebagai khalifah, namun suku Aws belum bersedia menerima pencalonan Sa'ad tersebut, karena juga mempertimbangkan kemungkinan golongan Muhajirin menentukan calonnya sendiri.

Sementara orang-orang Anshar masih berkumpul di Tsaqifah Bani Sa'idah, Umar, Abu 'Ubaidah ibn Jarrah dan beberapa kaum muslimin lainnya juga sibuk membicarakan pengganti Rasul. Pada saat itu Umar langsung meminta Abu 'Ubaidah mengulurkan tangannya untuk di bai'at karena dia kepercayaan umat. Namun Abu 'Ubaidah keberatan dengan alasan bahwa Abu Bakar lah figur yang lebih tepat untuk menggantikan Nabi.

Pada saat itu Umar, Abu Bakar, dan Abu 'Ubaidah datang menuju balai balai pertemuan kaum Anshar tadi. Dan pada saat itu terjadi perdebatan yang sangat alot dan masing-masing pihak

mengutarakan pendapatnya untuk siapa yang akan memegang jabatan khilafah tersebut. Maka dalam suasana yang tegang ini akhirnya Abu Bakarlah yang terpilih menjadi pengganti kepemimpinan Rasulullah di karenakan Abu Bakar merupakan sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad dan juga sesuai dengan pesan yang pernah di katakan oleh Rasulullah bahwasannya penggantinya kelak alangkah baiknya dari kaum Muhajirin.

Dengan Abu Bakar yang di tunjuk sebagai pengganti ke khalifahan Nabi Muhammad SAW, Umar lah orang yang pertama membai'at Abu Bakar dan selanjutnya Abu 'Ubaidah dan diikuti oleh kaum muslimin lainnya pada saat itu.<sup>56</sup>

#### b. Masa Umar ibn al-Khathab

Luasnya daerah kekuasaan Islam membuat Umar merasa perlu membenahi dan menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah di jalankan oleh khalifah Abu Bakar sebelumnya. Umar mengadakan pembaharuan yang signifikan dalam bidang administrasi negara.

---

<sup>56</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Dan Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 50-52.



Dengan tetap menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam, Umar meminta kepada tokoh-tokoh sahabat senior (*al-sabiqun al-awwalun*) untuk tidak meninggalkan kota Madinah. Umar membutuhkan tenaga mereka untuk memberikan masukan-masukan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Untuk pemerintahan di daerah, Umar mengangkat gubernur yang mempunyai otonomi yang luas. Mereka menjalankan tugas dan fungsi sebagai pembantu khalifah. Dalam rekrutmen pejabat, Umar terkenal sangat mementingkan profesionalisme dan kemampuan dalam bidang tugasnya. Di samping itu, aspirasi masyarakat yang berkembang juga cukup di dengar oleh Umar. Dengan demikian Umar menjauhkan diri dari praktik nepotisme dan main drop-drop dari atas untuk menentukan pejabat.

Dalam sebuah kasus, Umar pernah memecat Ammar ibn Yasir sebagai gubernur Kuffah karena “arus bawah” tidak merasa puas atas kepemimpinannya. Menurut masyarakat Kuffah, Ammar tidak

mengetahui seluk beluk politik pemerintahan, sehingga tidak pantas memegang jabatan tertentu.<sup>57</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan pada masa Umar ibn al-Khatab mengenai pemilihan seorang pemimpin daerah Umar selalu mendengarkan masukan-masukan dari masyarakatnya sendiri, dan apabila masyarakatnya merasa pejabat yang ada pada daerah tersebut tidak memenuhi kriteria maka masyarakat akan memberitahukannya kepada khalifah Umar ibn al-Khatab bahwasannya pejabat tersebut tidak layak menjadi seorang pemimpin atau kepala daerah. Dan apabila seseorang mampu dan menjadi suri tauladan di tengah-tengah masyarakatnya pada saat itu dan layak ia menjadi seorang pemimpin pada daerah tersebut maka rakyat akan memberitahukan kepada Umar bahwasannya seseorang tersebut layak menjadi seorang pemimpin.

Setelah rakyat memberitahukan kepada Umar ibn al-Khattab bahwasannya seseorang tersebut layak menjadi seorang pemimpin maka Umar akan mendiskusikannya kepada sahabat senior (*al-*

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 64-66.

*sabiqun al awwalun*) mengenai kepribadian orang yang di tunjuk oleh rakyat tersebut bahwasannya ia mampu untuk menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin kepala daerah, dan setelah itu Umar ibn al-Khattab akan menunjuk orang tersebut dan menjadikannya gubernur di daerah tersebut.

Dalam hal tersebut dapat di gambarkan bahwasannya khalifah Umar ibn al-Khattab lebih mengutamakan aspirasi dari masyarakatnya sebagai wujud demokrasi pada saat itu.<sup>58</sup>

#### c. Masa Khalifah Usman ibn Affan

Setelah mengalami luka parah akibat tikaman seorang budak Persia bernama Abu Lu'luah, para sahabat merasa khawatir kalau-kalau Umar meninggal dunia dan tidak sempat meninggalkan pesan penggantinya kelak, namun Umar menolak memenuhi permintaan sahabat-sahabat tersebut. Menurutnya, orang yang pantas untuk menduduki jabatan puncak menggantikannya sudah lebih dahulu meeninggal. Diantara sahabat kemudian mengusulkan agar Umar

---

<sup>58</sup> Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*, ( Gozian Press: Jakarta, 2013), h. 43.

menunjuk putranya Abdullah menjadi penggantinya. Dan pada saat itu Umar memilih enam sahabat senior yang terdiri dari Usman, Ali, Abd al-Rahman ibn Awf, Thalhah ibn Ubaidillah, Zubeir ibn Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan putranya sendiri Abdullah untuk menjadi penggantinya kelak.

Setelah Umar wafat dan dimakamkan, mulailah pemilihan pengganti Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah. Dalam hal ini mengedepankan musyawarah, dan musyawarah berjalan sangat alot karena masing-masing ingin menduduki jabatan khalifah. Pada mulanya Abd-Rahman Awf menawarkan agar ada yang mengundurkan diri, namun tidak ada yang mengundurkan diri, setelah itu Abd Rahman memulai untuk mengundurkan diri. Kemudian ia menanyakan kepada Usman tentang siapa yang pantas menjadi khalifah lalu Usman menjawab Ali, kemudian pertanyaan yang sama di berikan kepada Zubeir dan Sa'ad secara terpisah lalu keduanya menjawab Usman.

Ketika Ali di sodorkan dengan pertanyaan yang sama, jawaban yang diberikannya juga adalah Usman. Dari jawaban-jawaban

tersebut dapat di tarik polarisasi kekuatan, yaitu Ali dan Usman yang menjadi kandidat pengganti Umar ibn al-Khattab.<sup>59</sup>

#### d. Masa Khalifah Ali ibn Abi Thalib

Setelah pembunuhan Usman, para pemberontak mencari beberapa sahabat senior seperti Thalhah, Zubeir, dan Sa'ad ibn Abi Waqash untuk di bai'at menjadi khalifah. Namun di antara mereka tidak ada yang bersedia. Akhirnya mereka menoleh kepada Ali ibn Thalib. Pada awalnya pun Ali tidak bersedia, karena pengangkatannya tidak di dukung oleh kesepakatan penduduk Madinah dan veteran perang Badr (sahabat senior). Menurutny, orang yang di dukung oleh komunitas inilah yang lebih berhak menjadi khalifah. Akhirnya Malik Al-Asytar al-Nakha'i melakukan baiat diikuti keesokan harinya oleh sahabat besar seperti Thalhah dan Zubeir.

Pasca pembunuhan Usman, suasana begitu kacau, dan umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok. Tidak semua umat Islam melakukan baiat kepada Ali. Di Syam, Muawiyah yang masih keluarga

---

<sup>59</sup> Nurcholis Majid, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 36.

Usman menuntut balas kepada Ali atas kematian Usman. Ia menuduh Ali berada di belakang kaum pemberontak. Pada saat itu juga Muawiyah menyatakan diri secara terbuka sebagai tandingan Ali sebagai khalifah atau pemimpin di Syam dan ia bahkan mengarahkan tentaranya untuk memerangi Ali.

Dengan adanya Muawiyah menyatakan diri sebagai khalifah tandingan Ali yang meski pada saat itu telah di baiat oleh masyarakatnya sendiri dan sah menjadi khalifah pengganti Usman ibn Affan yang telah di bunuh oleh pemberontak merupakan cermin wujud demokrasi bahwasannya setiap orang berhak menyatakan dirinya sebagai seorang pemimpin meskipun Ali sendiri memerangi Muawiyah sendiri.<sup>60</sup>

## **2. Dalil-Dalil Mengenai Mencalonkan Diri Menjadi Seorang Pemimpin**

Adapun dalil- dalil mengenai mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin adalah terdapat di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 55 yang berbunyi:

---

<sup>60</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*, ( Gozian Press: Jakarta, 2013), h. 45.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi *berpengetahuan*.” (Qs. Yusuf 55).

Penafsiran ayat ini menerangkan permintaan Yusuf As kepada penguasa di zaman itu untuk mengangkatnya sebagai bendahara yang menjaga gudang pembendaharaan harta negeri, agar keadilan merata dan kezaliman di sirnakan Yusuf As akan menjadikan hal itu sebagai sarana penduduk negerin untuk mengajak negeri tersebut agar beriman kepada Allah SWT dan meninggalkan penyembahan berhala-berhala.

Al-Alamah Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwasannya Yusuf As berkata demi kemaslahatan umum “ *Jadikanlah aku sebagai bendaharawan negara* ”, yaitu sebagai bendaharawan yang menjaga hasil bumi, sebagai perwakilan, penjaga, dan yang mengurus. *Sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan*. Maksudnya adalah ini bukanlah sikap ketamakan Yusuf As untuk mendapatkan kepemimpinan, melainkan tekad beliau yang kuat untuk memberi manfaat secara umum.

Beliau sendiri tahu bahwa beliau memiliki kecukupan, amanah, dan kepandaian menjaga, yang mereka tidak mengetahui dari Yusuf As. Ayat ini menjelaskan bahwasannya di perbolehkannya seseorang menawarkan diri untuk mengambil sebuah kedudukan yang memang dia miliki keahlian dalam bidang tersebut. As-Syaukani menjelaskan bahwasannya di dalamnya terdapat dalil bagi seseorang yang meyakini jika dirinya masuk kesalah satu urusan pemerintahan akan bisa mengangkat cahaya kebenaran dan menghancurkan kebathilan yang mampu dia lakukan, diperbolehkan meminta hal itu untuk dirinya.

### **3. Pemilihan Seorang Pemimpin Ditinjau Dari Negara Islam**

#### **1. Negara Mesir**

Negara mesir merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dengan melaksanakan pemilihan umum yang mana sistem tersebut di pakai atau di gunakan dalam pemilihan presiden maupun pemilihan pejabat daerah lainnya. Adapun persyaratan pencalonan dalam konstitusi negara Mesir terdapat di dalam Pasal 76 dari konstitusi Mesir diantaranya adalah:



1. calon sudah harus menduduki salah satu posisi kepemimpinan puncak di partai mereka untuk jangka satu tahun.
2. Kandidat partai politik harus telah di tetapkan untuk jangka waktu lima tahun, dan berhasil menang 3% dari kursi di Majelis Rakyat (majelis rendah parlemen), dan 5% di Dewan Shora (majelis tinggi).
3. Kandidat independent harus menerima dukungan dari 250 anggota yang dipilih dari badan perwakilan Mesir (sekitar 6,5% dari total 3.847 perwakilan) dimana minimal 65 dukungan yang akan di peroleh dari Majelis Rakyat (yang merupakan 14%), 25 dukungan dari Dewan Syura (juga 14%) dan 10 dukungan dewan lokal dari 14 governorat (4,5%) untuk memastikan keterwakilan geografis.

## 2. Negara Turki

Negara turki juga menganut sistem demokrasi parlementer yang mana pemilihan seorang pemimpin di tentukan berdasarkan hasil pemilihan umum yang di pilih langsung ioleh rakyat Turki. Adapun persyaratan pencalonan untuk menjadi seorang pemimpin di negara Turki menurut

konstitusi negara Turki yang di laksanakan oleh Mahkamah Tinggi Pemilu Turki (YSK) mengharuskan bagi setiap calon yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin partai politiknya harus meraup ambang batas 10% dari suara nasional.

### 3. Negara Armenia

Negara Armenia merupakan negara muslim setelah negara Turki yang mana negara tersebut menganut sistem presidensial dan pemerintahannya mirip sekali yang di anut dinegara Indonesia. Adapun konstitusi negara Armenia menganut sistem pemilu yang berasaskan sistem proporsional yang artinya memiliki kesamaan dengan sistem pemilu yang ada di Indonesia.

Di negara Armenia pencalonan seorang pemimpin baik itu di pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dalam konstitusi negara Armnia memiliki ambang batas sebesar 5%. Ambang batas tersebut yang harus di penuhi oleh setiap partai politik yang ada di negara Armenia sebagai syarat untuk maju sebagai Presiden maupun kepala daerah di negara tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengkaji permasalahan yang terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik di sini diantaranya adalah:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 terkait dengan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terdapat pada bagian kedua persyaratan pencalonan paragraf I mengenai Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pasal 5 ayat (2) yang berbunyi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (1), yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir. Dalam

Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 tersebut terdapatnya adanya pembatasan bagi seseorang untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur dengan adanya syarat partai politik pengusung harus memperoleh 20% kursi di DPR, adanya hasil wawancara Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara mengatakan bawasannya dalam hal ini dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya di terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hanya sebesar 10% partai politik pengusung bakal calon pemilihan Gubernur. Oleh karena itu dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 persyaratan mencalonkan kepala daerah berubah dari 10% menjadi 20% jumlah partai pendukung yang duduk di kursi DPRD atau 25% dari jumlah perolehan suara sah dari pemilihan umum sebelumnya.

Dengan merujuk dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang terdapat pada pasal 12 huruf (i) partai politik berhak mengusulkan

pasangan calon kepala daerah tanpa ada batasan seperti yang tertera dalam PKPU No. 3 Tahun 2017. Dalam hal ini terjawablah permasalahan pertama yakni bagaimana mekanisme pencalonan Gubernur menurut peraturan perundang-undangan.

2. Pandangan fiqih siyasah dalam pemilihan seorang pemimpin diantaranya harus memiliki syarat sebagai berikut yakni seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil dengan segala persyaratan yang telah di tentukan. Kedua seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang memadai membuatnya dapat melakukan sebuah ijtihad untuk menghadapi kejadian yang akan timbul mendatang dan untuk membuat kebijakan hukum. Ketiga seorang pemimpin harus sehat dan tidak cacat fisiknya, artinya sehat penglihatan, sehat pendengaran, dan sehat sebagainya sehingga dapat menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Keempat tidak ada kekurangan anggota tubuh yang menghalanginya untuk bergerak cepat dan bangun. Dan kelima memiliki kemampuan untuk berijtihad dengan baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan

mewujudkan kemaslahatan. Keenam seorang pemimpin harus memiliki sifat keberanian dan sifat menjaga rakyat yang membuatnya mempertahankan rakyat dan memerangi musuhnya.

3. Berdasarkan kajian fiqh siyasah terhadap PKPU No. 3 Tahun 2017 mengenai pencalonan pemilihan Gubernur pada pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwasannya adanya ambang batas pencalonan seseorang untuk mencalonkan dalam pemilihan Gubernur melalui partai politik sebesar 20% kursi di DPRD dan 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir adalah tidak sejalan dengan konsep siyasah syar'iyah yang mencakup keadilan umat dan konsep siyasah dusturiyah yang mencakup hak-hak umat. Sebab pencalonan seseorang melalui partai politik dalam hal mencalonkan Gubernur termasuk kajian keadilan umat dan kajian hak-hak umat dalam negara Islam harus di tegakkan selagi ia masih mampu dan berkompeten menjadi seorang pemimpin. Dan menurut Al Mawardi tidak di jelaskan bahwasannya syarat menjadi seorang pemimpin harus di dukung

oleh sekumpulan orang atau golongan agar dapat menjadi seorang pemimpin.

Dan di dalam PKPU No. 3 Tahun 2017 yang terdapat ambang batas dalam menentukan calon seorang pemimpin, dalam hal ini sangat bertentangan dengan konsep dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 mengenai hak dari partai politik yang mana partai politik berhak mencalonkan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin.

4. Bahwa hasil penerapan peraturan Undang-Undang sebelum terbitnya PP Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan ambang batas sebesar 20% dari total jumlah yang duduk di kursi DPRD baru memenuhi kriteria mencalonkan menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur adanya peraturan perundang-undangan mengenai pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur ambang batas yang ditetapkan hanya sebesar 10-15% menurut Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara Ir. Benget Silitonga.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran, antara lain:

1. Bagi pemerintah khususnya pembentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 yang merujuk pada PP No. 1 Tahun 2014 untuk mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang terdapat pada Bab VI Hak dan Kewajiban Partai Politik pada pasal 12 huruf (i) yang berbunyi “ partai politik berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota serta Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”.
2. Bagi pemerintah untuk mengkaji ulang Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merujuk pada PP No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyulitkan calon dari partai politik untuk maju sebagai calon Gubernur/kepala daerah di karenakan besarnya syarat ambang batas dari PKPU No. 3 Tahun



2017 tersebut sebesar 20% jumlah kursi dari partai politik pengusung bakal calon tersebut. Hal ini telah melanggar ketentuan baik dalam konsep Hak Asasi Manusia maupun pandangan fiqih siyasah yakni siyasah syar'iyah dan siyasah dusturiyah. Dan dalam hal ini konsep fiqih siyasah menurut Imam Al Mawardi tidak ada persyaratan untuk mencalonkan seorang pemimpin harus di dukung oleh sekelompok golongan atau partai politik, jika orang tersebut mampu dan memenuhi syarat yang di tentukan oleh Al Mawardi maka orang tersebut layak menjadi seorang pemimpin.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Azra, Azyumardi CBE, *Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*,  
(Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

Al- Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum  
Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Darul  
Falah, 2014).

A.Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-  
Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Budiardjo, Miriam, *Partisipasi Dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor,  
2008).

Djaelani, Abdul Qadir, *Sekitar Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gema /Insani  
Press, 2008).

Ibrahim, Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,  
(Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,

(Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

Jurdi, Fatahullah, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Kusnardi, Mohammad dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*,

(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI cet. ke-8, 2010).

Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Mahkamah Konstitusi RI, *Jurnal Konstitusi PPK-FH UNIV. BRAWIJAYA*

*Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar*

*Berkonstitusi Vol. II*, (Jakarta: MK RI, 2009).

MD, Mahfud, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT.

Rineka Cipta, 2001).

Nurhakim, Mohammad, *Politik Alternatif: Suatu Perspektif Islam/Abdul 'Ala*

*Al Maududi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).

Nugraha, Al Fajar “ *Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam*

*Perspektif Fiqih Siyasah ”*, *Jurnal Hukum Islam* XV, 2, (Desember

2016).

Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Negara (Edisi ke-2)*, (Jakarta: Robbani Press, 2005).

Sdajali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara Jilid ke-2*, (Jakarta: UI Press, 2014).

Soekanto, Soerjono, *Bahan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Samuddin, Rapung, *Fiqih Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013).

Trijono, Rachmat, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, (Depok Timur: Papas Sinar Sinanti, 2013).

Thoha, Miftah, *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Zoubya Journal, *Journal Fiqih Siyasah Pendalaman Siyasah Syar'iyah Mengenai Peraturan Perundang-Undangan DI Indonesia Vol. I* (Jakarta: Zoubya Journal, 2008).

Zulkarnaen, *Hukum Konstitusi*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2012).

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Pasal 40).

PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,/Atau Walikota Dan Wakil

Walikota.

## **Internet**

JDIH KPU Provinsi Sumatera Utara. go. Id.

*[http://Tribun Medan-Pemilihan GUBSU Tahun 2018.co.id](http://TribunMedan-PemilihanGUBSU.Tahun2018.co.id).*

*[http://Sistem Pemerintahan Negara Negara Islam.co.id](http://SistemPemerintahanNegaraNegaraIslam.co.id).*

*[http://dilemapartai politik nasdem dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara word press.go.id](http://dilemapartai.politik.nasdem.dalam.pemilihan.Gubernur.Sumatera.Utara.word.press.go.id) yang di akses pada tahun 2017.*

*<http://detik.com> Pilkada serentak di Kabupaten Lebak Banten yang di akses tahun 2013.*

*[http://www.pilkadasumut dalam siyasah. Com](http://www.pilkadasumut.dalam.siyasah.Com) “ Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara Tahun 2018 Menurut Perspektif Siyasah yang di akses 18 Agustus 2018.*

## **LAMPIRAN**

### **A. Daftar Pertanyaan/Wawancara KPU Provinsi Sumatera Utara**

Adapun daftar pertanyaan/ wawancara yang di ajukan untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara mengenai pencalonan dalam pemilihan Gubernur di Sumatera Utara diantaranya:

1. Apa sajakah yang menjadi tugas dan wewenang KPU Provinsi Sumatera Utara selama pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan Gubernur di Sumatera Utara ?
2. Mengenai PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sejauh manakah penegakan peraturan tersebut khususnya dalam hal pencalonan pemilihan Gubernur di Sumatera Utara tahun 2018?
3. Apasajakah yang menjadi kendala dalam me realisasikan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 mengenai pencalonan Gubernur khususnya di Sumatera Utara oleh KPU Provinsi Sumatera Utara ?
4. Apakah peraturan Komisi Pemilihan Umum sebelumnya mengenai ambang batas yang terdapat dalam PKPU No. 3 Tahun 2017 persyaratan pencalonan Gubernur sebesar 20% jumlah kursi dari partai politik pengusung calon tersebut?

5. Apakah peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yang terdapat pada Pasal 5 mengenai ambang batas pencalonan seorang Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya?
6. Berapa jumlah kontestan partai politik yang ikut serta dalam pemilihan Gubernur di Sumatera Utara tahun 2018 ini ?
7. Dari peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yang terdapat pada pasal 5 mengenai ambang batas pencalonan seorang Gubernur maka menyebabkan adanya koalisi koalisi partai politik, partai politik apa sajakah yang berkoalisi pada saat pemilihan Gubernur tahun 2018 tersebut ?
8. Bagaimana partai politik mendeklarasikan bakal calon Gubernurnya dalam PILKADA di Sumatera Utara tahun 2018 pada saat itu ?
9. Sejauhmanakah peran partai politik dalam proses pencalonan bakal calon dari partai politik dalam pemilihan Gubernur di Sumatera Utara ?
10. Partai politik apasajakah yang telah mendaftarkan calonnya di KPU Provinsi Sumatera Utara dan siapa sajakah calon calon nya tersebut ?



## **B. Dokumentasi Saat Penelitian Ke KPU Provinsi Sumatera Utara**



